



KANTOR HUKUM
HUSSEIN ABUDIN, SH & PARTNERS

Advokat dan Konsultan Hukum

Jalan Kalibata Timur 1 No. 1 RT 003/010 Kelurahan Rawajati Barat Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
HP. 085241881777, E-Mail. Abudinhusein@Yahoo.com.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 24. 5. 2019
JAM	: 00. 42 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Ahmad Ridha Sabana
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Alamat : Jalan Penjernihan 1 No.28 RT 002/007,
Bend. Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat-10210
Email : dpp@partaigaruda.org
NIK : 3174052201720004
- Nama : Abdullah Mansuri
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan
Pusat Partai Gerakan Perubahan
Indonesia
Alamat : Jalan Penjernihan 1 No.28 RT 002/007,
Bend. Hilir, Kec Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat-10210
Email : dpp@partaigaruda.org.
NIK : 3174081008821001

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019;

Sebagaimana berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Husein Abudin, S.H.
NIK : 7471100508760003
No. KTPA : 7471100508760003
2. Nama : Muhammad Bahctiar, S.H., M.H.
NIK : 7306081401800003
No. KTPA : 1520202
3. Nama : Jalal Wangsi, S.H.
NIK : 3175092107880007
No. KTPA : 16.04361
4. Nama : Renaldy Permana, S.H.
NIK : 3175012412881002
No. KTPA : 15.029222

Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hussein Abudin, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Kalibata Timur 1 No. 1, Kel. Rawa Jati, Pancoran Jakarta Selatan. Nomor HP. 085241881777. untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum R.I. yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perihal: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB (bukti P-1), sebagai berikut:

A. KEWENGANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut

UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);

Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut :

➤ **PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR D KAB/KOTA TANJUNG PINANG

DAPIL TANJUNG PINANG 2

Tabel 1 : **Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR D Kab/Kota Tanjung Pinang:**

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	2,056	1,993	-63
2.	GERINDRA	5,292	5,292	0
3.	PDI PERJUANGAN	6,295	6,295	0
4.	GOLKAR	5,945	5,795	-150
5.	NASDEM	4,444	4,444	0
6.	GARUDA	1,904	2,117	213
7.	BERKARYA	1,216	1,216	0
8.	PKS	3,561	3,561	0
9.	PERINDO	386	386	0
10.	PPP	2,210	2,210	0
11.	PSI	729	729	0
12.	PAN	3,030	3,030	0
13.	HANURA	3,271	3,271	0
14.	DEMOKRAT	4,912	4,912	0
19.	PBB	321	321	0
20.	PKPI	226	226	0
TOTAL		45,798	45,798	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Pengurangan suara Pemohon di Tanjung Pinang 2 sebanyak 213 suara, penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 63 suara dan Partai Golongan Karya sebanyak 150

Pengurangan suara Pemohon di Tanjung Pinang 2 sebanyak 213 suara, penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 63 suara dan Partai Golongan Karya sebanyak 150 Suara.

➤ **PROVINSI RIAU**

2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DUMAI

DAPIL KOTA DUMAI 4

Tabel 1: **Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Dumai**

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	724	724	
2.	GERINDRA	4,040	4,009	-31
3.	PDI PERJUANGAN	4,494	4,494	
4.	GOLKAR	5,777	5,668	-109
5.	NASDEM	4,355	4,212	-143
6.	GARUDA	1,850	2,600	
7.	BERKARYA	111	111	
8.	PKS	7,416	7,416	
9.	PERINDO	53	53	
10.	PPP	2,772	2,772	
11.	PSI	278	278	
12.	PAN	4,027	3,929	-98
13.	HANURA	2,584	2,444	-140
14.	DEMOKRAT	8,683	8,454	-229
19.	PBB	1,611	1,611	
20.	PKPI	13	13	
TOTAL		50,471	50,471	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Pengurangan suara Pemohon di Dumai 4 sebanyak 750 suara, penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 31 suara, Partai

Golongan Karya sebanyak 109, partai Nasdem 143, Partai Amanat Nasional 98, Partai Hanura 140, Partai Demokrat 229.

➤ **PROVINSI SULAWESI BARAT**

3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR D KAB/KOTA

DAPIL MAMASA 3

Tabel 1: **Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR D Kab/Kota**

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	2,500	2,500	
2.	GERINDRA	3,749	3,749	
3.	PDI PERJUANGAN	3,425	3,385	-40
4.	GOLKAR	1,951	1,919	-32
5.	NASDEM	7,310	7,310	
6.	GARUDA	1614	1,931	
7.	BERKARYA	10	10	
8.	PKS	2643	2,616	-27
9.	PERINDO	1,375	1,375	
10.	PPP	962	943	-19
11.	PSI	3,770	3,719	-51
12.	PAN	1,988	1,888	-100
13.	HANURA	3,207	3,203	-4
14.	DEMOKRAT	1,927	1,912	-15
19.	PBB	1,350	1,326	-24
20.	PKPI	584	579	-5
TOTAL		38,365	38,365	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Pengurangan suara Pemohon di dapil Mamasa 3 sebanyak 317 suara, penambahan suara Partai PDI Perjuangan sebanyak 40 suara, Partai Golongan Karya sebanyak 32 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 27 suara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 19 suara, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 51 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 100 suara, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 4 suara, Partai Demokrat sebanyak 15 suara Partai Persatuan Pembangunan (PBB) sebanyak 24 suara dan Partai PKPI sebanyak 5 suara.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- 3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kota Tanjung Pinang, Dapil Tanjung Pinang 2 :

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	1,993
2.	GERINDRA	5,292
3.	PDI PERJUANGAN	6,295
4.	GOLKAR	5,795
5.	NASDEM	4,444
6.	GARUDA	2,117
7.	BERKARYA	1,216
8.	PKS	3,561
9.	PERINDO	386
10.	PPP	2,210
11.	PSI	729
12.	PAN	3,030
13.	HANURA	3,271
14.	DEMOKRAT	4,912
19.	PBB	321
20.	PKPI	226
TOTAL		45,798

- 3.2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kota Dumai dapil Dumai 4

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	724
2.	GERINDRA	4,009
3.	PDI PERJUANGAN	4,494
4.	GOLKAR	5,668
5.	NASDEM	4,212
6.	GARUDA	2,600
7.	BERKARYA	111
8.	PKS	7,416
9.	PERINDO	53
10.	PPP	2,772
11.	PSI	278
12.	PAN	3,929
13.	HANURA	2,444
14.	DEMOKRAT	8,454
19.	PBB	1,611
20.	PKPI	13
TOTAL		50,471

3.3. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Mamasa dapil Mamasa 3

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	2,500
2.	GERINDRA	3,749
3.	PDI PERJUANGAN	3,385
4.	GOLKAR	1,919
5.	NASDEM	7,310
6.	GARUDA	1,931
7.	BERKARYA	10
8.	PKS	2,616
9.	PERINDO	1,375
10.	PPP	943
11.	PSI	3,719
12.	PAN	1,888
13.	HANURA	3,203
14.	DEMOKRAT	1,912
19.	PBB	1,326
20.	PKPI	579
TOTAL		38,365

3.4. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan Provinsi Maluku Utara dapil Maluku Utara 1

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	12,005
2.	GERINDRA	13,300
3.	PDI PERJUANGAN	23,926
4.	GOLKAR	23,621
5.	NASDEM	13,354
6.	GARUDA	7,305
7.	BERKARYA	7,155
8.	PKS	6,355
9.	PERINDO	9,606
10.	PPP	3,713
11.	PSI	2,095
12.	PAN	7,876
13.	HANURA	6,640
14.	DEMOKRAT	13,855
19.	PBB	8,224
20.	PKPI	946
TOTAL		159,376

3.5. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya dapil Lanny Jaya 3

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	560
2.	GERINDRA	1,058
3.	PDI PERJUANGAN	6,245
4.	GOLKAR	1,433
5.	NASDEM	2,826
6.	GARUDA	5,008
7.	BERKARYA	1,438
8.	PKS	6,603
9.	PERINDO	16,090
10.	PPP	3,314
11.	PSI	898
12.	PAN	5,771
13.	HANURA	4,083
14.	DEMOKRAT	4,654
19.	PBB	4,049
20.	PKPI	3,687
TOTAL		67,717

3.6. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya dapil Lanny Jaya 2

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	4,000
2.	GERINDRA	4,113
3.	PDI PERJUANGAN	3,112
4.	GOLKAR	2,086
5.	NASDEM	6,205
6.	GARUDA	12,663
7.	BERKARYA	4,138
8.	PKS	1,733
9.	PERINDO	2,457
10.	PPP	3,467
11.	PSI	6,467
12.	PAN	4,830
13.	HANURA	1,089
14.	DEMOKRAT	7,689
19.	PBB	211
20.	PKPI	0
TOTAL		64,260

3.7. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dapil Talaud 1

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	304
2.	GERINDRA	1,206
3.	PDI PERJUANGAN	4,062
4.	GOLKAR	1,505
5.	NASDEM	3,238
6.	GARUDA	1,164
7.	BERKARYA	2,972
8.	PKS	323
9.	PERINDO	339
10.	PPP	0
11.	PSI	969
12.	PAN	654
13.	HANURA	2,850
14.	DEMOKRAT	1,543
19.	PBB	0
20.	PKPI	1,967
TOTAL		23,096

3.8. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Provinsi Maluku Utara dapil Maluku Utara 3

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	PKB	12,005
2.	GERINDRA	13,300
3.	PDI PERJUANGAN	23,926
4.	GOLKAR	23,621
5.	NASDEM	13,354
6.	GARUDA	7,305
7.	BERKARYA	7,155
8.	PKS	6,355
9.	PERINDO	9,606
10.	PPP	3,713
11.	PSI	2,095
12.	PAN	7,876
13.	HANURA	6,640
14.	DEMOKRAT	13,855
19.	PBB	8,224
20.	PKPI	946
TOTAL		159,376

3.9. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya 2

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	PKB	7,824
2.	GERINDRA	1,297
3.	PDI PERJUANGAN	5,038
4.	GOLKAR	3,184
5.	NASDEM	5,599
6.	GARUDA	4,720
7.	BERKARYA	3,145
8.	PKS	5,805
9.	PERINDO	2,898
10.	PPP	2,478
11.	PSI	735
12.	PAN	4,469
13.	HANURA	3,036
14.	DEMOKRAT	8,091
19.	PBB	3,945
20.	PKPI	4,553
TOTAL		66,817

3.10. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya 1

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	PKB	2,753
2.	GERINDRA	2,953
3.	PDI PERJUANGAN	8,688
4.	GOLKAR	3,532
5.	NASDEM	5,792
6.	GARUDA	9,692
7.	BERKARYA	1,091
8.	PKS	980
9.	PERINDO	6,192
10.	PPP	1,703
11.	PSI	603
12.	PAN	2,347
13.	HANURA	2,157
14.	DEMOKRAT	13,875
19.	PBB	2,318
20.	PKPI	4,350
TOTAL		69,026

3.11. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya 3

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	PKB	472
2.	GERINDRA	721
3.	PDI PERJUANGAN	1,656
4.	GOLKAR	5,173
5.	NASDEM	6,252
6.	GARUDA	4,659
7.	BERKARYA	3,781
8.	PKS	1,034
9.	PERINDO	5,850
10.	PPP	0
11.	PSI	4,526
12.	PAN	2,394
13.	HANURA	4,342
14.	DEMOKRAT	7,491
19.	PBB	408
20.	PKPI	7,102
TOTAL		55,861

3.12. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya 4

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	PKB	2,441
2.	GERINDRA	2,660
3.	PDI PERJUANGAN	5,432
4.	GOLKAR	5
5.	NASDEM	7,698
6.	GARUDA	5,781
7.	BERKARYA	269
8.	PKS	0
9.	PERINDO	5,667
10.	PPP	957
11.	PSI	5
12.	PAN	8,089
13.	HANURA	6,634
14.	DEMOKRAT	21,445
19.	PBB	7,986
20.	PKPI	5,317
TOTAL		80,386

3.13. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Flores Timur 1

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	PKB	2,241
2.	GERINDRA	2,660
3.	PDI PERJUANGAN	5,432
4.	GOLKAR	0
5.	NASDEM	7,698
6.	GARUDA	5,781
7.	BERKARYA	269
8.	PKS	0
9.	PERINDO	5,667
10.	PPP	957
11.	PSI	5
12.	PAN	8,089
13.	HANURA	6,634
14.	DEMOKRAT	21,445
19.	PBB	7,986
20.	PKPI	5,317
TOTAL		80,386

3.14. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan 5

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	2,590
2.	GERINDRA	933
3.	PDI PERJUANGAN	4,930
4.	GOLKAR	1,008
5.	NASDEM	2,568
6.	GARUDA	1,815
7.	BERKARYA	1,975
8.	PKS	10
9.	PERINDO	738
10.	PPP	23
11.	PSI	1,936
12.	PAN	1,712
13.	HANURA	605
14.	DEMOKRAT	1,391
19.	PBB	268
20.	PKPI	1,797
TOTAL		24,299

3.15. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kenggotaan DPRD Kabupaten Nabire 2

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	304
2.	GERINDRA	1,206
3.	PDI PERJUANGAN	4,062
4.	GOLKAR	1,505
5.	NASDEM	3,238
6.	GARUDA	1,164
7.	BERKARYA	2,972
8.	PKS	323
9.	PERINDO	339
10.	PPP	0
11.	PSI	969
12.	PAN	654
13.	HANURA	2,850
14.	DEMOKRAT	1,543
19.	PBB	0
20.	PKPI	1,967
TOTAL		23.096

3.16. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Tolikara 4

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	304
2.	GERINDRA	1,206
3.	PDI PERJUANGAN	4,062
4.	GOLKAR	1,505
5.	NASDEM	3,238
6.	GARUDA	1,164
7.	BERKARYA	2,972
8.	PKS	323
9.	PERINDO	339
10.	PPP	0
11.	PSI	969
12.	PAN	654
13.	HANURA	2,850
14.	DEMOKRAT	1,543
19.	PBB	0
20.	PKPI	1,967
TOTAL		23.096

3.17. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Mamasa 1

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	304
2.	GERINDRA	1,206
3.	PDI PERJUANGAN	4,062
4.	GOLKAR	1,505
5.	NASDEM	3,238
6.	GARUDA	1,164
7.	BERKARYA	2,972
8.	PKS	323
9.	PERINDO	339
10.	PPP	0
11.	PSI	969
12.	PAN	654
13.	HANURA	2,850
14.	DEMOKRAT	1,543
19.	PBB	0
20.	PKPI	1,967
TOTAL		23.096

3.18. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	304
2.	GERINDRA	1,206
3.	PDI PERJUANGAN	4,062
4.	GOLKAR	1,505
5.	NASDEM	3,238
6.	GARUDA	1,164
7.	BERKARYA	2,972
8.	PKS	323
9.	PERINDO	339
10.	PPP	0
11.	PSI	969
12.	PAN	654
13.	HANURA	2,850
14.	DEMOKRAT	1,543
19.	PBB	0
20.	PKPI	1,967
TOTAL		23.096

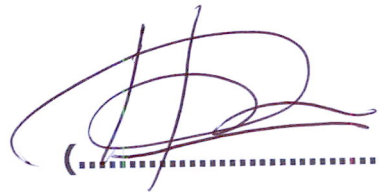
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemelihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

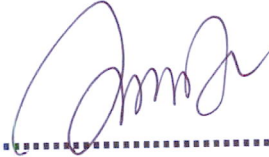
Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

HUSEIN ABUDIN, S.H.



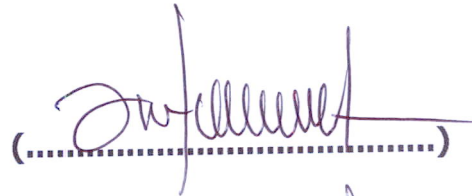
(.....)

MUHAMMAD BAHCTIAR, S.H., M.H.



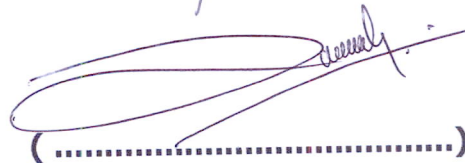
(.....)

JALAL WANGSI, S.H.



(.....)

RENALDY PERMANA, S.H.



(.....)